

TINGKATKAN PENGAWASAN PUBLIK, ORI MALUKU LAKUKAN PENGUATAN JEJARING

Kamis, 11 November 2021 - Oktavuri Rilien Prasmasari

Ambon, Ambontoday.com.- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Maluku, Rabu 10 November 2021, menggelar kegiatan Pengembangan Jaringan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Dalam Pengawasan Publik di Maluku yang berlangsung di lantai 7 Hotel Everbright.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jejaring Ombudsman Maluku berasal dari Aktivis, LSM, Mahasiswa maupun unsur Jurnalis.

Mengawali kegiatan itu, Kepala Perwakilan ORI Maluku, Hasan Slamet, SH.MH menyampaikan, Ombudsman sebagai salah satu lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pelayanan publik di Maluku saat ini masih sangat terbatas karena jumlah SDM yang ada tidak seimbang dengan tugas yang mesti dilakukan.

ORI Perwakilan Maluku mesti melakukan pengawasan di 11 kabupaten/kota di Maluku terhadap seluruh lembaga baik pemerintah maupun swasta, bahkan perorangan yang menggunakan APBD maupun APBN.

"Pengawasan yang kita lakukan itu sungguh sangat berat olehnya itu, hari ini ORI Maluku kami berpikir untuk menyegarkan lagi hubungan jejaring yang selama ini terbina bersama Ombudsman.

Bapak/ibu adalah sahabat Ombudsman. Sebagai sahabat bisa menjadi mata, telinga dan hati daripada Ombudsman untuk melakukan pengawasan publik yang begitu berat itu tidak bisa diletakan pada Ombudsman semata tetapi Ombudsman sangat membutuhkan kerja-kerja strategis, mitra-mitra strategis serta hubungan yang harus terbina secara sinergis dan berkelanjutan," ungkap Hasan.

Dikatakan, sesuai UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, implemementasinya di Maluku makin tidak baik-baik saja. Hal ini tergambarkan dari survey dan kunjungan yang dilakukan Ombudsman di 11 kabupaten/kota di Maluku dalam rangka menyelesaikan laporan-laporan yang diterima terkait pelayanan publik.

"Hal ini merupakan tanggungjawab kita semua untuk membenahi itu, karena teman-teman di pemerintahan tidak mungkin mengawasi diri mereka sendiri, karena dalam hukum ketatanegaraan kita, pemerintah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota adalah subprastuktur politik begitu juga dengan legislatif maka yang bisa menopang dan mengawasi mereka supaya dalam tugasnya mereka bisa berjalan pada jalur yang benar, sesuai amanat undang-undang adalah infrastruktur politik. Siapakah infrastruktur politik, infrastruktur politik itu adalah teman-teman LSM, Mahasiswa, Jurnalis. Memang terhadap hal ini kurang disadari oleh subprastuktur politik sehingga masih menimbulkan perdebatan-perdebatan sampai saat ini," paparnya.

Ditambahkan, sesuai gambaran survei kepatuhan yang dilakukan ORI Maluku di 11 kabupaten/kota di Maluku untuk tahun-tahun kemarin kita masih berada di zona merah, dan untuk tahun 2021 hasilnya akan dirilis dalam bulan November atau Desember.

Gambaran zona merah ini dikarenakan pelayanan publik yang dilakukan belum maksimal. Untuk itu penguatan jejaring Ombudsman di saat ini sangat penting guna meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik di Maluku.

Usai sambutan Kaper ORI Maluku dilanjutkan dengan materi seputar peningkatan jejaring Ombudsman dalam rangka melakukan pengawasan publik di Maluku yang dibawakan oleh Semy Hutuwally.

Mozes Fabeat Ambon.